

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab Pertama ini akan membahas mengenai pendahuluan. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab, antara lain sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut:

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islamic Relief Worldwide merupakan sebuah Organisasi Internasional non-Pemerintah yang memfokuskan diri dalam membantu masalah kemanusiaan di seluruh dunia. Sesuai namanya yang terdapat kata 'Islam' di dalamnya maka organisasi ini tidak hanya bergerak memberikan bantuan kemanusiaan seperti lembaga kemanusiaan lainnya namun juga menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman visi dan misinya. Islamic Relief Worldwide didirikan pada tahun 1984 oleh Dr Hany El-Banna dan para muridnya dari Universitas Birmingham di Inggris (History | Islamic Relief Worldwide).

Pembentukan Organisasi ini awalnya sebagai respon kegeraman terhadap bencana kemanusiaan di Afrika berupa kelaparan yang kian merajalela namun tidak mendapatkan penanganan yang baik dan upaya pemerintah setempat yang cenderung pasif. Isu tersebut lah yang kemudian menjadi alasan awal terbentuknya Islamic Relief Worldwide, yang mana diharapkan dengan adanya lembaga yang fokus terhadap kemanusiaan dengan berpegang dengan pedoman syariat Islam dapat menjadi solusi terbaik dalam mengentaskan masalah-masalah kemanusiaan tanpa memandang latar belakang ras, suku, bangsa, negara maupun agama. Seiring waktu berjalan kegiatan Islamic Relief pun mulai melebar ke berbagai negara

dan Islamic Relief pun mulai menjamah ke isu-isu kemanusiaan kontemporer, tidak hanya tentang isu kelaparan dan kemiskinan yang Organisasi ini sering tangani di tahun-tahun sebelumnya. Saat ini Islamic Relief tercatat telah menyediakan berbagai program yang memberi manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan di lebih dari 30 negara di seluruh dunia (Where we work | Islamic Relief Worldwide). Oleh karena itu Islamic Relief Worldwide pun menambah programnya yang awalnya hanya membantu korban kemanusiaan seperti kemiskinan, kelaparan, bencana alam, konflik dan kemudian berkembang dengan program lainnya yaitu program Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) terhadap daerah-daerah korban kemanusiaan.

Prinsip Kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam visi utama Organisasi ini telah menjadikan suatu kepekaan terhadap isu-isu kemanusiaan yang kerap muncul di berbagai negara sehingga menghasilkan aksi tanggap dan cepat dalam memberikan bantuan terhadap korban kemiskinan maupun korban terdampak bencana. Penanganan yang baik tersebut menjadikan Islamic Relief Worldwide sebagai Organisasi Islam Terbesar di Dunia dan mendapatkan pengakuan dari NGO Advisor sebagai Top 20 dari 500 LSM terkemuka di Dunia (Islamic Relief in Top 20 of world's 500 leading NGOs | Islamic Relief UK).

Salah satu isu kemanusiaan yang cukup menarik perhatian Islamic Relief adalah krisis kemanusiaan di negara Myanmar yang menimpa etnis Rohingya. Etnis Rohingya ini sebenarnya telah menjadi etnis 'terbuang' sejak berpuluh tahun lalu tepatnya tahun 1948 pada saat Myanmar medeka dari Inggris. Hal tersebut karena Myanmar menganggap etnis Rohingya sebagai kaum pendatang bukan penduduk asli sehingga mereka tidak layak mendapatkan status sebagai warga negara Myanmar.

“Pada fakta sebenarnya, meskipun terdapat (135) ras nasional yang hidup di Myanmar, yang disebut orang Rohingya bukanlah salah satu dari mereka. Secara sejarah, disana tidak pernah ada ras Rohingya di Myanmar.

Sesungguhnya nama Rohingya merupakan ciptaan sebuah kelompok pemberontak di wilayah Rakhine. Sejak perang pertama Myanmar kuno pada tahun 1842, orang berkeyakinan Muslim dari negara perbatasan secara illegal masuk ke Myanmar Ngain-ngan, terutama di wilayah Rakhine. Menjadi imigran illegal mereka tidak memegang kertas imigrasi seperti orang negara nasional lainnya” (Alternative ASEAN Network on Burma, 2006).

Kebijakan Myanmar tersebut menyebabkan terjadinya perlakuan diskriminasi terhadap etnis Rohingya oleh banyak kalangan di Myanmar. Banyak terjadi upaya pengusiran terhadap etnis Rohingya yang bersifat kekerasan seperti pembakaran rumah, pemerkosaan, pengambilan hak milik secara paksa, penyiksaan bahkan pembunuhan. Amnesty International mencatat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap etnis Rohingya pada tahun 1978 menyebabkan sekitar 200.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh karena pemberlakuan operasi Nagamin oleh Junta Militer (Amnesty International, 2004). Operasi ini dilakukan dalam upaya memeriksa setiap individu yang berada di Myanmar, mendokumentasikan status kewarganegaraan, serta daftar orang-orang yang memasuki Myanmar secara ilegal (Human Rights Watch/Asia, 1996). Data diatas menunjukkan bahwa perlakuan buruk terhadap etnis Rohingya tidak hanya dilakukan oleh kaum etnis mayoritas di Myanmar namun juga dimotori oleh pemerintah yang melakukan kekerasan semena-mena dengan didasari alasan untuk memburu etnis Rohingya yang berstatus imigran illegal. Perlakuan diskriminatif tersebut pun terus terjadi terhadap etnis Rohingya selama berpuluh tahun kemudian hingga puncaknya pada tahun 2012. Dimana pada Mei 2012, terjadi sebuah kejadian yang meyalut api konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya yang berujung pada penyiksaan terhadap etnis Rohingya dan menyebabkan banyak korban berjatuhan.

Tragedi tersebut bermula dari tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa pria dari etnis Rohingya terhadap seorang gadis Rakhine bernama Ma Thida Htwe.

Beberapa isu buruk berkembang luas di masyarakat Rakhine sehingga memicu kemarahan terhadap etnis Rohingya. Situasi pun semakin buruk ketika beredarnya foto forensik jasad gadis tersebut yang menunjukkan metode pembunuhan yang dilakukan oleh pria Rohingya tersebut. Foto tersebut pun membakar amarah warga yang kemudian melampiaskan amarahnya dengan menyerang sebuah bus di persimpangan Thandwe-Taungup dan membunuh sepuluh orang penumpang beragama Islam di dalamnya. Kejadian tersebut pun semakin memperuncing ketidaksukaan mereka terhadap etnis Rohingya. Kekejaman terhadap etnis Rohingya semakin sering dilakukan dengan dalih bahwa mereka bukan bagian dari negara Myanmar. Bahkan seorang biksu Budha yang fotonya tenar di sosial media menyerukan untuk menghalau bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya, “Rohingya no” (Nugroho, 2012). Data Human Right Watch menyebut antara 2012 hingga 2014 ada 300 ribu warga Muslim Rohingya terusir dari Myanmar. Tahun 2012, muncul gerakan *Rohingya Elimination Group* yang didalangi oleh kelompok ekstremis 969. Tak kurang dari 200 jiwa dan 140.000 warga Rohingya lainnya dipaksa tinggal di kamp-kamp konsentrasi yang tidak manusiawi (Bhawono, 2017). Keadaan tersebut pun memaksa banyak diantara mereka melarikan diri dari Myanmar untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Banyak pengungsi yang mencari perlindungan menuju negara-negara lain dengan alat transportasi seadanya bahkan mayoritas menggunakan perahu kayu biasa sehingga kemudian dikenal dengan sebutan “manusia perahu”. Banyak diantara mereka memilih mengungsi ke negara terdekat seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Australia, dsb.

Kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut sangat menarik perhatian dunia Internasional. Banyak kalangan pun mulai bersimpati dan membahas secara khusus kondisi etnis Rohingya yang tidak memiliki kejelasan statusnya tersebut sehingga mengalami perlakuan diskriminatif. Kondisi kehidupan mereka yang penuh penyiksaan dan kekejaman dari puluhan tahun lalu hingga sekarang baik dari kaum mayoritas

maupun pemerintah membuat banyak negara dan lembaga kemanusiaan termasuk Islamic Relief Worldwide tergerak untuk memberikan bantuan.

Islamic Relief Worldwide sebagai lembaga kemanusiaan Islam langsung sigap dalam menanggapi konflik yang menimpa etnis Rohingya tersebut. Islamic Relief mulai membantu etnis Rohingya pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, mereka membantu sekitar 100.000 umat Buddha dan Muslim sebagai korban kekerasan antar-komunal menyapu negara Rakhine. Bantuan tanggap darurat tersebut meliputi distribusi makanan, tempat tinggal, dan pemasangan sumur, kakus dan toilet (Myanmar). Selain itu Islamic Relief juga membantu pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke berbagai negara tetangga dengan mengerahkan lembaga cabang Islamic Relief di berbagai negara lainnya. Islamic Relief Malaysia (IRM) terus mengirim misi bantuan khusus untuk pengungsi Rohingya di Cox's Bazaar, Bangladesh meskipun negara itu akan mulai mengirim pengungsi pulang ke Myanmar. IRM menetapkan target untuk menyiapkan empat sumur air bersih di Cox's Bazaar. Islamic Relief juga aktif bekerja untuk mengimplementasikan lebih banyak program dan distribusi bantuan darurat untuk membantu mereka yang terkena dampak konflik dan kekerasan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut (Myanmar - Islamic Relief USA).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penulis adalah **“Bagaimana Upaya Islamic Relief Worldwide (IRW) dalam Membantu Menyelesaikan Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya pada Konflik Myanmar?”**

## C. Kerangka Teori

### 1. NGO (*Non Governmental Organisation*)

Dalam Hubungan Internasional terdapat aktor-aktor yang berperan dalam interaksi Dunia Internasional. Aktor dalam Hubungan Internasional sendiri dibedakan menjadi dua bagian yaitu aktor negara (*State actor*) dan aktor non-negara (*Non-state actor*). Aktor negara terdiri dari negara itu sendiri sedangkan aktor non-negara terdiri dari *inter-governmental organizations* (IGOs) atau organisasi antar pemerintah, *non-governmental organizations* (NGOs) atau organisasi non-pemerintah, *Multinational Corporations* (MNC) atau perusahaan multinasional dan individu yang berpengaruh.

Pada mulanya dalam kajian ilmu hubungan internasional, yang memiliki peranan penting di dalamnya adalah negara. Hal ini dikarenakan kajian Hubungan Internasional adalah sebuah studi yang menganalisa atau mendiskusikan mengenai interaksi yang dilakukan negara dalam sebuah sistem internasional. Kemudian, di akhir Perang Dunia kedua, yakni sekitar tahun 1945, mulai banyak bermunculan aktor-aktor lain yang memberikan nuansa baru dalam dinamika internasional seperti lembaga internasional, perusahaan, bahkan individu (Hadi, 2016).

Salah satu aktor Internasional dalam Hubungan Internasional yang sangat berpengaruh dewasa ini adalah *Non-governmental Organizations* (NGO). NGO kini mempunyai peran yang penting di tengah banyaknya isu-isu kontroversial yang kian beragam tiap waktunya. Sehingga keberadaan NGO cukup diperhatikan oleh berbagai pihak dan dianggap sangat membantu persoalan-persoalan Internasional yang tidak bisa diatasi oleh aktor negara maupun aktor lainnya yang terkait dengan negara.

Definisi NGO menurut World Bank adalah :

“Organisasi swasta yang mengedepankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mempromosikan kepentingan orang miskin, melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial dasar, atau melakukan pengembangan masyarakat” (Malena, 1995)

Sedangkan menurut Peter van Tuijl, definisi NGO adalah sebagai berikut :

“NGO merupakan organisasi independen, non-partisan, non profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang termarginalkan” (Tuijl, 1999)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa NGO adalah Aktor Hubungan Internasional yang bersifat independen dan mempunyai nilai-nilai sosial dalam visinya. Keberadaannya yang tidak terikat dengan negara menjadikannya lebih leluasa dalam pergerakannya. Anggota NGO sendiri berasal dari kalangan masyarakat umum dengan berbagai profesi yang memperjuangkan hal-hal tertentu sehingga melahirkan berbagai NGO dengan fokus tujuan tertentu yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Namun biasanya NGO memperjuangkan sesuatu yang bersifat sosial. Terkadang NGO pun berperan dalam menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi isu-isu dalam sebuah negara maupun skala internasional.

Berdasarkan aktivitas utamanya, NGO dibagi menjadi dua kategori yaitu operasional dan advokasi (Hildy Teegen, 2004). Yang dimaksud dengan operasional adalah NGO yang menyediakan barang dan jasa bagi ‘klien’ yang membutuhkan. NGO Operasional tujuan utamanya adalah perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan, untuk menjalankan proyek dan program mereka. Proses ini umumnya membutuhkan organisasi yang

kompleks. NGO operasional ini masih dapat dibagi atas 3 kelompok besar:

1. Organisasi berbasis masyarakat: NGO operasional yang melayani suatu populasi khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit.
2. Organisasi Nasional: NGO operasional yang beroperasi dalam sebuah negara yang sedang berkembang.
3. Organisasi Internasional: NGO operasional yang pada dasarnya berkantor pusat di negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu negara yang sedang berkembang.

Sementara NGO advokasi adalah NGO yang bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. NGO Advokasi tujuan utamanya adalah mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah untuk atau atas isu itu. Berlawanan dengan manajemen proyek operasional, organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan-kegiatan aktivis. NGO ini pada dasarnya bekerja melalui advokasi atau kampanye atas suatu isu dan tidak mengimplementasikan program. Dalam melakukan praktek advokasi, NGO menggunakan berbagai macam cara seperti lobi, berperan sebagai pakar serta penasehat, mengadakan penelitian, mengadakan konferensi, memonitor dan mengekspos tindakan aktor lain, mengadakan pengadilan publik, membagikan informasi terhadap konstituen utama, membentuk agenda ataupun melakukan boikot (Hudson, 2001). Kelompok ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan kelompok operasional, namun dengan tingkatan dan komposisi yang berbeda.



Maka sesuai dari spesifikasi NGO diatas, Islamic Relief Worldwide masuk dalam kategori NGO operasional karena melakukan upaya pemberian bantuan kemanusiaan terhadap daerah dan orang-orang yang menjadi korban kemanusiaan. Bahkan program bantuan dari Islamic Relief Worldwide kini telah berkembang menjadi program Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) terhadap daerah-daerah terdampak. Salah satu kegiatan sosialnya adalah partisipasi Islamic Relief dalam membantu korban terdampak konflik di Myanmar khususnya terhadap etnis Rohingya. Islamic Relief telah ikut andil dalam membantu etnis Rohingya sejak tahun 2012. Berbagai program kemanusiaan pun telah dilaksanakan guna membantu para etnis Rohingya yang telah menjadi korban sejak berpuluh tahun lalu. Upaya bantuan terhadap pemukiman etnis Rohingya untuk membantu membangun kembali kesejahteraan dan memberikan rasa aman pada daerah konflik menjadi tujuan utama pada setiap programnya.

## 2. Aksi kemanusiaan atau Humanitarisme (*Humanitarian Action*)

Konsep ini berasal dari berabad-abad lalu ketika masyarakat sudah mulai menerapkan kegiatan amal dan filantropi sebagai aktivitas budaya dan agama mereka dengan tujuan masing-masing. Yang kemudian menjadi kebiasaan yang melekat pada tiap orang. Namun pada abad ke-19 banyak bermunculan gerakan-gerakan kemanusiaan di berbagai belahan dunia terutama di wilayah barat. Fenomena tersebut menciptakan Sistem Humanitarian Moderen. Kemudian pada tahun 1859 terjadi perang Solferino yang cukup hebat. Jean Henry Dunant sangat kaget melihat parahnya dampak dari pertempuran tersebut yang menyisakan banyak korban dan kondisi yang mengenaskan. Hal tersebut membuat Jean berinisiatif untuk memberikan bantuan terhadap korban perang bersama penduduk setempat. Kemudian Jean menuliskan sebuah buku yang berjudul *Memory of Solferino* dan lahirlah sebuah konsep Aksi Kemanusiaan atau Humanitarianisme.

Lalu Konsep ini pula yang menjadi cikal bakal dari lahirnya sebuah NGO kemanusiaan yang kini menjadi garda terdepan dalam aksi kemanusiaan di dunia yaitu International Committee of the Red Cross (ICRC).

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh *European Universities on Professionalization on Humanitarian Action* (EUPRHA), Aksi Kemanusiaan mempunyai definisi sebagai berikut :

“Melindungi kehidupan dan martabat masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan konflik di seluruh dunia” (Salgado, *The State of Art of Humanitarian Action*, 2003)

Nilai-nilai yang mendasari prinsip-prinsip kemanusiaan seperti amal, kasih sayang, belas kasihan dan penghormatan terhadap kehidupan dan martabat manusia selalu hadir di semua masyarakat dan agama (sedekah dalam Kristen, dāna dalam Hinduisme, Buddhisme, Jainisme dan Sikhisme, zakat dalam Islam, tzedakah dalam Yudaisme dan lain-lain) dan menembus berbagai masalah kehidupan: misalnya, kebutuhan untuk memberikan perawatan medis sesuai kebutuhan dan tanpa diskriminasi apapun diabadikan dalam etika kedokteran. (*International Review of the Red Cross*, 2016)

Kemudian berdasarkan nilai-nilai diatas maka terbentuklah empat prinsip Fundamental yang menjadi acuan utama aksi kemanusiaan para aktor Hubungan Internasional. Keempat prinsip tersebut antara lain: (Salgado, *The State of Art of Humanitarian Action*, 2003)

1. Kemanusiaan (*Humanity*)

Penderitaan manusia pasti terjadi ditinggalkan dimanapun itu terjadi. Tujuan aksi kemanusiaan adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan sementara memastikan rasa hormat terhadap manusia

mahluk dan ini seharusnya menjadi motivasi miliknya.

2. Ketidakberpihakan (*Impartiality*)  
Aksi kemanusiaan harus dilakukan sesuai kebutuhan, memprioritaskan pada kasus-kasus mendesak dan tanpa membedakan kewarganegaraan, ras, jenis kelamin, keyakinan agama, kelas, politik pendapat atau lebih jauh diskriminasi.
3. Kenetralan (*Neutrality*)  
Aktor kemanusiaan seharusnya tidak ambil bagian dalam permusuhan atau terlibat dalam politik, ras, religius atau ideologis kontroversi.
4. Kemerdekaan (*Independence*)  
Aksi harus tetap bebas dari unsur politik, ekonomi, militer atau pengaruh aktor kemanusiaan yang kompromi kemampuan untuk bertindak sesuai dengan intinya prinsip.

Islamic Relief Worldwide adalah Organisasi kemanusiaan Islam yang memperjuangkan terpenuhinya hak-hak sosial tiap orang sebagai respon atas kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Keempat Prinsip diatas pun telah menjadi pedoman bagi pergerakan Organisasi Islamic Relief Worldwide dalam melakukan aksi kemanusiaannya. Dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan pergerakannya, Islamic Relief merumuskan nilai-nilai tersebut dalam Lima (5) Prinsip, yaitu Ikhlas (*Sincerity*), Ihsan (*Excellence*), Rahma (*Compassion*), Adil (*Social Justice*), Amanah (*Custodianship*) (Islamic Relief Worldwide, 2014).

Islamic Relief Worldwide pun mengaplikasikan 5 konsep prinsipnya dalam membantu korban dari konflik Myanmar khususnya etnis Rohingya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa Negara Myanmar terutama terhadap etnis Rohingya, Islamic Relief telah memberikan bantuan kemanusiaan sejak tahun 2012 lalu. Bantuan tersebut ditujukan kepada korban-korban yang membutuhkan tanpa memandang ras, agama, baik warna

kulit. Selain itu Islamic Relief juga turut membantu Lembaga Swadaya Masyarakat setempat dengan menyediakan peralatan kebersihan, perlengkapan sekolah, tempat penampungan korban dan perabotan. Pemberian bantuan tersebut terus berlanjut meski banyak hambatan yang membatasi upaya bantuan mereka. Hingga ketika konflik di daerah Rakhine semakin memuncak dan menyebabkan banyak korban berjatuhan, maka Islamic Relief pun semakin gencar memberikan bantuan tanggap darurat berupa tempat penampungan, pemasangan sumur, kamar kecil dan distribusi makanan. Dan yang terbaru Islamic Relief telah mencanangkan program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) untuk etnis Rohingya.

### 3. *Transnational Advocacy Network* (TAN)

Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink adalah aktor-aktor yang bekerja dalam skala internasional pada suatu isu, aktor-aktor ini disatukan oleh nilai-nilai bersama dan wacana bersama, serta memiliki intensitas yang padat dalam pertukaran informasi dan jasa (Keck & Sikkink, 1999). *Transnational Advocacy Networks* adalah upaya advokasi yang dilakukan dengan membangun jaringan yang bersifat melintasi batas-batas negara. Para aktor ini bekerja sama dengan terorganisir untuk mengangkat isu maupun norma-norma atau fenomena baru. Aktor-aktor yang ada didalam konsep *Transnational Advocacy Network* tidak mengandalkan kekuatan fisik seperti militer atau ekonomi, melainkan Jaringan dari aktor advokasi tersebut memiliki pengaruh yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Ketika proses pembuatan keputusan yang hanya bisa diakses oleh aktor-aktor tradisional seperti Negara maka kelompok-kelompok advokasi membuka dan ikut masuk didalam arena tersebut dengan membawa suara serta kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam arena. Dengan kata lain, Jaringan Advokasi Transnasional mengangkat isu dari masyarakat agar isu tersebut dapat didengar dan diperhatikan.

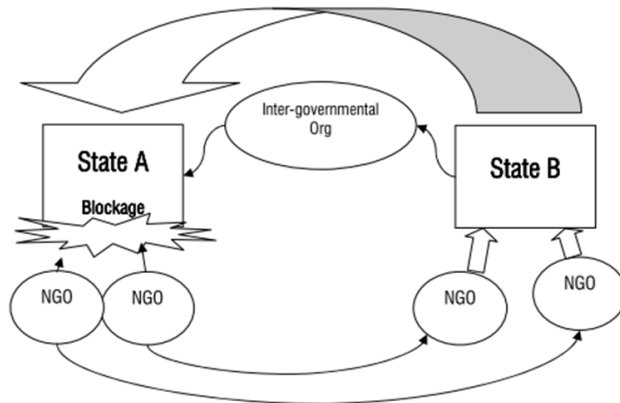
Menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Transnational Advocacy Networks* muncul karena keadaan dan kondisi tertentu yaitu:

1. Terhambatnya atau terputusnya sebuah struktur yang menghubungkan antara kelompok lokal dan pemerintahan, dimana dengan adanya struktur penghubung yang kurang baik maka menimbulkan keadaan yang kurang efektif dalam memecahkan masalah, sehingga muncul situasi boomerang pattern yang mempengaruhi karakteristik dari jaringan tersebut.
2. Aktivistis atau aktor politik yang percaya bahwa jaringan yang ada dapat memajukan misi-misi dan kampanye mereka, serta secara aktif mempromosikan mereka.
3. Adanya konferensi internasional dan berbagai bentuk interaksi internasional yang memberikan wadah untuk membentuk dan menguatkan jaringan.

Dalam konsep *Transnational Advocacy Network* terdapat tujuh aktor utama yang mampu memberikan kontribusi, yaitu (1) NGO (*Non-Governmental Organization*) lokal dan internasional baik peneliti maupun organisasi advokasi, (2) gerakan sosial lokal, (3) yayasan, (4) media, (5) organisasi keagamaan, serikat buruh, pelanggan organisasi dan para intelektual, (6) bagian dari organisasi antarpemerintah baik regional maupun internasional, (7) serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan. Tidak perlu semua aktor-aktor tersebut untuk membentuk sebuah Jaringan Advokasi Transnasional, hanya dengan terdiri dari beberapa aktor saja, jaringan tersebut sudah dapat terbentuk dan dapat berjalan. Pemerintah, pelaku aktivitas serta local social movements merupakan aktor yang memiliki peran paling besar menurut konsep *Transnational Advocacy Network*, sedangkan aktor-aktor TAN sering kali memiliki gangguan untuk masuk ke dalam arena politik domestik sebuah negara. Karena itulah mereka menggunakan koneksi dari jaringan internasional untuk membantu tentang persoalan yang sedang dihadapi, dari

situlah akan terbentuk pola hubungan yang disebut oleh Keck dan Sikkink sebagai *Boomerang pattern*.

Gambar 1 1 Model Boomerang Pattern



Sumber: Keck & Sikkink, *Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics* (1998), hal. 13

Menurut Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Boomerang Pattern* adalah sebuah pola ketika NGO melakukan sebuah advokasi dan upaya itu tidak berhasil, baik itu karena negara tersebut enggan untuk melakukan perubahan seperti yang diinginkan NGO itu atau karena alasan lain, NGO tersebut mencari jalan pintas dengan membangun jejaring advokasi di negara lain. Hubungan yang terjalin biasanya antara NGO di Negara berkembang dengan negara atau NGO di negara maju, dengan harapan negara atau NGO tersebut bisa menekan negara yang dimaksud bisa melalui organisasi internasional atau menekan secara langsung. *Boomerang Pattern* muncul sebagai pola atau model interaksi antar aktor dalam TAN sebagai akibat dari terhambatnya jalur aspirasi dari aktor-aktor domestik dalam suatu negara ke pihak pemerintahnya sendiri. Aktor-aktor ini mengambil langkah-langkah alternatif dengan membangun jaringan dengan aktor-aktor internasional untuk mencari dukungan dan

memperjuangkan isu yang telah diusungkan dan juga mempengaruhi pemerintahan di negaranya dari luar.

Untuk mencapai tujuan dari pergerakan, terdapat 4 strategi yang digunakan, yaitu:

1. *Information politics*, kemampuan untuk mentransfer dengan cepat informasi politik yang berguna dan memiliki kredibilitas atau dapat dipercaya, ke tempat yang akan mendapatkan pengaruh yang paling kuat.
2. *Symbolic politics*, kemampuan dalam memberikan kesan yang kuat melalui simbol, aksi, ataupun cerita yang akan menggambarkan situasi ataupun tuntutan, meskipun sasaran individu tersebut berada di jarak yang jauh.
3. *Leverage politics*, kemampuan untuk menggambarkan situasi dimana aktor yang memiliki power dapat mengendalikan situasi dan berpengaruh, sedangkan aktor yang tidak memiliki power terlihat tidak memiliki pengaruh.
4. *Accountability politics*, usaha yang digunakan dengan membantu aktor-aktor yang mempunyai kekuatan untuk bertindak atau beraksi dalam kebijakan atau prinsip yang mereka sokong.

Meskipun konsep ini lebih cenderung digunakan oleh NGO advokasi namun bukan berarti konsep ini hanya berguna bagi kegiatan advokasi saja. Banyak pula NGO kategori operasional yang menggunakan konsep ini untuk mempermudah aktivitas mereka. Daerah konflik yang bahkan melibatkan pemerintah umumnya sangat sulit untuk dimasuki pihak dari luar. Entah memang kondisi di lapangan yang mencekam dan tak layak untuk dimasuki atau ada kebijakan pemerintah yang tak ingin ada campur tangan dari luar. Sama halnya yang terjadi pada konflik Myanmar yang pecah di daerah Rakhine. Pemerintah Myanmar beberapa kali memperketat akses masuk dan membatasi NGO bahkan bantuan ke daerah konflik. Islamic Relief pun ikut merasakan

kesulitan yang sama sejak awal-awal kedatangan mereka. Maka dengan konsep *Transnational Advocacy Network* ini dapat dilihat upaya yang telah dilakukan oleh Islamic Relief guna mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, Islamic Relief turut menerapkan strategi pada konsep TAN yaitu *Information Politics*. Islamic Relief bergabung dalam forum INGO yang mana bertujuan untuk mempengaruhi dan meningkatkan keefektifan dan koherensi kemanusiaan, bantuan pembangunan Negara Myanmar. Hal ini dilakukan dengan mengeksplorasi peluang untuk mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan praktik terbaik melalui berbagi informasi yang terkoordinasi, memfasilitasi dialog dan keterlibatan konstruktif dengan pengambil keputusan nasional dan internasional yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pembangunan, dengan demikian mendukung lingkungan yang mendukung untuk LSM internasional agar menjadi lebih baik mencapai tujuan mereka.

Dalam strategi *Leverage Politics*, Islamic Relief telah bekerjasama dengan lembaga independen dan kemanusiaan lokal *Myanmar Heart Development Organization* untuk membantu menyalurkan bantuan ke daerah di luar jangkauan atas nama Islamic Relief. Selain itu Islamic Relief telah juga bekerja sama dengan UNHCR (Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi) yang tentu mempunyai akses lebih besar untuk membantu pengungsi internal yang menghadapi kerawanan dan membutuhkan bantuan pangan besar-besaran akibat genosida. Staf lokal Islamic Relief bekerja keras untuk mendapatkan akses ke semua komunitas yang membutuhkan secepat mungkin, bertemu dengan pejabat dari UNOCHA dan Oxfam serta pemerintah lokal.

Untuk meningkatkan penyaluran bantuan, Islamic Relief bekerjasama dengan PULSE Bangladesh yang sudah disetujui oleh otoritas Bangladesh untuk bekerja dalam krisis saat ini di kamp-kamp Bazar Cox (Islamic Relief).



#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diterapkan oleh penulis maka penulis membuat kesimpulan sementara, yaitu:

- Islamic Relief Worldwide membantu pemulihan kesejahteraan etnis Rohingya dengan pemberian bantuan berupa barang, fasilitas maupun relawan dengan menggunakan nilai-nilai Islam sebagai landasannya
- Islamic Relief Worldwide melakukan kerjasama dengan organisasi lainnya untuk memudahkan mencapai tujuan

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Pada penelitian ini akan membahas mengenai Upaya Islamic Relief Worldwide (IRW) sebagai Lembaga Kemanusiaan non-Pemerintah dalam membantu Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya pada Konflik Myanmar.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Inti tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan tentang Upaya Islamic Relief Worldwide (IRW) dalam membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan Etnis Rohingya pada Konflik Myanmar. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian Deskriptif-Analisis dimana peneliti mendeskripsikan kemudian menganalisis Upaya Islamic Relief Worldwide (IRW) sebagai NGO operasional yang bergerak dalam kemanusiaan dalam upaya membantu Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya pada Konflik Myanmar. Penelitian ini didukung oleh literasi kepustakaan dalam teknik pengumpulan datanya yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi literature

yaitu mencari dan membaca buku-buku, laporan jurnal, artikel, tabloid, koran, dan data-data internet baik nasional maupun internasional. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu dengan menganalisis data sekunder data yang berasal dari hasil interpretasi data primer baik berupa buku, artikel dan sumber dari media elektronik lainnya kemudian menggunakan teori-teori tertentu untuk menggambarkan dan menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Berikut merupakan tahap-tahap dari metode penelitian penulis:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan metode studi kepustakaan. Data yang diperoleh berasal dari berbagai buku, dokumen, jurnal, sumber internet, artikel maupun informasi dari media cetak yang diyakini masih mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang dikaji.
2. Metode analisis data-data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan diteliti dengan menggunakan teknik analisa deskriptif-analisis. Teknik analisa ini diawali dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh kemudian melakukan analisis hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya yang diteliti agar dapat menggambarkan hubungan tertentu secara konkret dan terperinci untuk menarik suatu kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada Bab Pertama ini penulis akan membahas mengenai pendahuluan. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab, antara lain sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua akan dijelaskan secara rinci mengenai Organisasi Islamic Relief sebagai organisasi kemanusiaan. Akan terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai Islamic Relief yaitu Latar belakang Islamic Relief Worldwide dan Komitmen Islamic Relief Worldwide. Pada sub bab pertama akan meliputi Sejarah Berdirinya Islamic Relief Worldwide, Visi dan misi, Struktur Organisasi, Sumber Dana, Partnership Islamic Relief Worldwide. Sedangkan sub bab kedua akan lebih menjabarkan tentang bentuk kegiatan Islamic Relief dan Sub terakhir akan berisi tentang penghargaan terbesar yang sudah diterima Islamic Relief selama ini.

Lalu di Bab Ketiga penulis akan memaparkan secara luas mengenai etnis Rohingya beserta masalah yang menimpa mereka. Akan terdapat 3 Sub Judul yaitu Sejarah etnis Rohingya, Latar belakang konflik Myanmar serta Masalah Kemanusiaan Etnis Rohingya.

Kemudian di Bab Keempat penulis akan menganalisis aksi kemanusiaan Islamic Relief Worldwide dalam upaya Islamic Relief membantu krisis kemanusiaan etnis Rohingya dalam Konflik Myanmar.

Dan di Bab Kelima akan berisi semua kesimpulan pembahasan penelitian dari keseluruhan bab-bab sebelumnya.